

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan kumpulan catatan informasi perusahaan berupa data keuangan pada periode tertentu. Setiap perusahaan melaporkan pencapaian target usahanya melalui informasi pada laporan keuangannya. Informasi di dalam laporan keuangan mempunyai peranan yang sangat penting bagi para pengguna tidak hanya bagi pihak internal perusahaan, tetapi juga penting bagi pihak eksternal seperti pemegang saham, investor, kreditur, lembaga keuangan, masyarakat, ataupun pemerintahan agar mereka dapat melihat dan menilai perkembangan kinerja perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, sedangkan menurut Kasmir (2011) laporan keuangan adalah informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan.

Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang dibuat dengan benar dan disajikan secara jujur kepada pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan sudah seharusnya memiliki integritas agar pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal dapat menggunakannya dengan bijak dan dapat membuat keputusan yang semestinya. Integritas merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya konsistensi

antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Maka dari itu, integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutupi atau disembunyikan (Hardiningsih, 2010).

Laporan keuangan yang berintegritas dari suatu perusahaan sangatlah penting untuk meningkatkan kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya dan juga meningkatkan penilaian yang baik mengenai kinerja perusahaan untuk pengambilan keputusan bagi *stakeholder*. Penilaian integritas laporan keuangan perusahaan merupakan acuan bagi para investor, kreditur dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan untuk menginvestasi atau memberi pinjaman dananya, membeli produk atau memakai jasa ataupun pihak yang ingin berhutang pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dalam pembuatan laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Akan tetapi, pada kenyataannya mewujudkan integritas laporan keuangan merupakan hal yang berat. Terbukti dengan terjadinya beberapa kasus kecurangan atau manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan nakal.

Salah satu kasus yang terungkap terjadi sekitar tahun 2016 yaitu kasus PT Timah (Persero) Tbk yang diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester I 2015 lalu. Kegiatan laporan keuangan fiktif ini dilakukan guna menutupi kinerja keuangan PT Timah yang terus mengkhawatirkan. Ketua Ikatan Karyawan Timah (IKT), Ali Samsuri mengungkapkan, kondisi keuangan PT Timah sejak tiga tahun belakangan kurang sehat. Selain itu, direksi PT Timah (Persero) Tbk (TINS) dikatakan telah banyak melakukan kesalahan dan

kelalaian semasa menjabat selama tiga tahun sejak 2013 lalu. Ali Samsuri mengatakan bahwa IKT menilai direksi telah banyak melakukan kebohongan publik melalui media seperti pada saat *press release* laporan keuangan semester I-2015 yang mengatakan bahwa efisiensi dan strategi yang telah dilaksanakan membuahkan kinerja yang positif. Padahal pada kenyataannya pada saat itu laba operasi rugi sebesar Rp 59 miliar. (tambang.co.id)

Kasus ini tidak hanya berhenti sampai disini. Selanjutnya pada Rabu, 15 April 2020 PT Timah Tbk baru saja merilis laporan keuangan tahun 2019. Di luar rugi bersih Rp 611,28 miliar di tahun 2019, manajemen Timah merevisi data laporan keuangan tahun 2018 yang disajikan kembali. Sebelumnya laba bersih TINS per 31 Desember 2018 berjumlah Rp 531,35 miliar, kini nilainya direvisi menjadi Rp 132,29 miliar. Revisi tersebut menyebabkan laba bersih TINS tahun 2018 turun 73,67 persen jika dibandingkan perolehan tahun 2017 yang sebesar Rp 502,43 miliar. (kompas.com)

Selain kasus PT Timah (Persero) Tbk, terdapat juga kasus yang terjadi pada PT Cakra Mineral Tbk (CKRA) tahun 2016. Direksi PT Cakra Mineral telah dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena kasus penggelapan, manipulasi akuntansi serta masalah terkait pengungkapan palsu yang diarahkan oleh Boelio Muliadi, Presiden Direktur perusahaan ini. Perusahaan publik yang tercatat di BEI dengan kode saham CKRA ini telah ramai diberitakan dengan tuduhan penipuan, manipulasi, dan pengungkapan tidak benar. Pemberitaan ini semakin riuh dengan semakin banyaknya investor yang mengungkapkan kerugian yang mereka alami akibat dari perilaku tidak terpuji dari direksi perusahaan publik ini. Para pemegang

saham mula-mula dari PT Takaras Inti Lestari (TIL) dan PT Murui Jaya Perdana (MJP), yang merupakan dua tambang zirkonium telah melaporkan bahwa 55 persen sahamnya telah diakuisisi oleh CKRA dalam laporan tahunan tahun 2014 dan 2015, menuduh Boelio Muliadi (Presiden Direktur CKRA), Argo Trinandityo (Direktur), Dexter Sjarif Putra (Direktur), dan Harun Abidin (yang merupakan pemegang saham pinjam CKRA). Berdasarkan keterangan dari pengacara PT Takaras dan PT Murui, Jefferson Dau menjelaskan bahwa CKRA telah berkolusi untuk mendorong PT Takaras dan PT Murui agar menandatangani perjanjian pembelian saham dengan pernyataan palsu, serta gagal menjalankan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian dan gagal menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian. Selain PT Takaras dan PT Murui, ada juga seorang investor internasional yang memiliki sejumlah besar saham CKRA mengaku mengalami kerugian yang signifikan akibat dari informasi palsu, menyesatkan dan tidak akurat yang diberikan oleh CKRA dalam laporan tahunan publik serta laporan keuangan. Jadi selama lebih dari dua tahun, direksi CKRA telah dengan tidak benar mengklaim bahwa CKRA memiliki 55 persen saham di PT Murui sejak bulan Agustus 2014, namun ternyata CKRA tidak pernah terdaftar sebagai pemegang saham PT Murui. Direksi CKRA telah sengaja menggelembungkan nilai aset CKRA dengan secara palsu mengkonsolidasikan laporan keuangan serta melebih-lebihkan nilai modal yang telah disetor dari dua tambang tersebut sehingga para investor tidak bisa membuat keputusan investasi yang tepat dan menyebabkan para investor mengalami kerugian yang signifikan dari pengungkapan yang palsu, menyesatkan dan tidak tepat tersebut. (beritalima.com)

Terungkapnya kasus-kasus ketidakjujuran perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan-perusahaan dengan penyajian laporan keuangan yang lemah bahkan kurang dalam keintegritasannya dan akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat khususnya bagi pengguna informasi laporan keuangan. Hal ini juga akan menimbulkan kecurigaan pada tata kelola perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *corporate governance*. Adanya beberapa kasus tersebut dapat menunjukkan bahwa praktik *corporate governance* yang digunakan dalam perusahaan itu tidak mampu meminimalkan ketidakjujuran manajemen dalam penyajian laporan keuangan. Menurut Tunggal (2013:149) *corporate governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Apabila suatu perusahaan dapat menerapkan dan menjalankan sistem pengelolaan perusahaan dengan baik, maka kasus-kasus kecurangan yang terjadi mungkin dapat diminimalisir.

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan, prosedur, dan hubungan antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. *Corporate governance* merupakan prinsip perusahaan yang perlu ditetapkan dalam mengelola perusahaan untuk dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Jika *corporate governance* dapat dilaksanakan dengan semakin baik, maka diharapkan akan dapat mengurangi perilaku manajemen perusahaan yang bersifat menguntungkan diri sendiri sehingga laporan keuangan dapat disajikan

dengan integritas yang tinggi, yaitu laporan yang disajikan menyajikan informasi yang benar dan jujur. Pada penelitian ini, mekanisme *corporate governance* diukur menggunakan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan dan untuk memastikan adanya efektifitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor. Perusahaan yang memiliki komisaris independen lebih cenderung dapat menghasilkan laporan keuangan yang memiliki integritas yang tinggi. Dalam penelitian sebelumnya menurut Gayatri dan Suputra (2013), Mais dan Nuari (2016), Johana dan Djuitaningsih (2020), dan Verea, dkk. (2017) menyatakan komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, menurut Wijaya (2022) menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan menurut Fatimah, dkk. (2020), Indrasti (2020), Qonitin dan Yudowati (2018), serta Wulandari dan Budiarta (2014) menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga non-bank dimana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain. Kepemilikan institusional dianggap dapat melakukan fungsi *monitoring* yang efektif dan dapat meminimalisir kecurangan manajemen dalam penyampaian dan penyajian laporan keuangan. Dalam penelitian

sebelumnya menurut Fajaryani (2015), Indrasti (2020), Wulandari dan Budiarta (2014), serta Verrya, dkk. (2017) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, menurut Mais dan Nuari (2016) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan menurut Gayatri dan Suputra (2013), Fatimah, dkk. (2020), Johana dan Djuitaningsih (2020), serta Qonitin dan Yudowati (2018) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang memiliki tugas mengawasi atas proses pelaporan keuangan dan audit eksternal. Dalam hal pelaporan laporan keuangan, komite audit bertugas mengawasi dan memonitor audit laporan keuangan dan memastikan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen telah sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Dalam penelitian sebelumnya menurut Gayatri dan Suputra (2013), Johana dan Djuitaningsih (2020), serta Verrya, dkk. (2017) menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, menurut Qonitin dan Yudowati (2018) menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan menurut Fatimah, dkk. (2020) serta Wulandari dan Budiarta (2014) menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Selain mekanisme *corporate governance* dalam perusahaan, besar kecilnya perusahaan juga menjadi sorotan dalam penyajian laporan keuangan yang berintegritas. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan

investasi dalam saham perusahaan tersebut semakin banyak. Perusahaan yang besar juga lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, berbeda dengan perusahaan kecil yang cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Dalam penelitian sebelumnya menurut Gayatri dan Suputra (2013), Fatimah, dkk. (2020), Fajaryani (2015), dan Verya, dkk. (2017) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, menurut Indrasti (2020) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan menurut Mais dan Nuari (2016) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Setiap perusahaan baik itu perusahaan kecil ataupun perusahaan besar tentunya pernah menggunakan hutang untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaannya. Kebijakan hutang (*leverage*) juga menjadi salah satu faktor pendorong perusahaan agar menyajikan laporan keuangan yang berintegritas. Kebijakan hutang merupakan kebijakan pendanaan eksternal perusahaan. *Leverage* adalah rasio perbandingan antara hutang dan aset dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Permasasari (2012) mengungkapkan untuk menghilangkan keraguan kreditur akan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, perusahaan perlu mengungkapkan informasi dengan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, sebuah perusahaan dengan *leverage* tinggi memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi secara lebih luas

dibandingkan perusahaan dengan *leverage* yang rendah. Akan tetapi, semakin tinggi *leverage* perusahaan akan meningkatkan risiko yang dihadapi investor sehingga mereka menuntut perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Dalam penelitian sebelumnya menurut Gayatri dan Suputra (2013) serta Fatimah, dkk. (2020) menyatakan *leverage* atau kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, menurut Fajaryani (2015) serta Mais dan Nuari (2016) menyatakan *leverage* atau kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan menurut Indrasti (2020), Johana dan Djuitaningsih (2020), serta Verrya, dkk. (2017) menyatakan *leverage* atau kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Adanya beberapa kasus terungkap yang melibatkan integritas laporan keuangan serta adanya *research gap* atau kesenjangan hasil penelitian yang berbeda yang didapatkan oleh penulis dari penelitian-penelitian terdahulu, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali kepada variabel-variabel tersebut. Maka dari itu, adapun judul yang diambil oleh penulis adalah **“Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023”**.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
- 2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
- 3) Apakah komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
- 4) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
- 5) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan.
- 5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap integritas laporan keuangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam menilai Integritas Laporan Keuangan dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance* (komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit), ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang memiliki integritas sehingga berguna bagi pengambilan keputusan.

b) Bagi pengguna laporan keuangan

Penelitian ini diharapkan memperkaya pengetahuan pengguna laporan keuangan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan sehingga para pengguna dapat menggunakan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Jensen *and* Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal atau pemilik) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan layanan tertentu demi kepentingan prinsipal yang melibatkan pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Menurut Eisenhardt (1989) dalam Istiantoro, dkk. (2017) teori agensi dapat memegang beberapa asumsi dasar dari motivasi manusia, asumsi tersebut yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*).

Maka, dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Adanya asumsi bahwa individu bertindak untuk memaksimalkan keuntungan, mengakibatkan agen memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal. Hal ini memicu agen untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka

panjang bisa merugikan kepentingan perusahaan, bahkan untuk mencapai kepentingan sendiri, agen bisa bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa (Kholmi, 2010).

Perusahaan berkewajiban memberikan pengungkapan informasi melalui laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama karena kelompok ini berada dalam kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Adanya asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat membuka peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan *earnings management* dalam rangka mengelabui pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Dalam hal ini apabila manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik saham, maka manajer akan cenderung melakukan kecurangan dengan melakukan manipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan keuntungannya sendiri.

Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat diminimalisir dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*.

Corporate governance diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan

menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Penerapan *corporate governance* juga dapat memberikan kepercayaan terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan biaya keagenan (*agency cost*). *Good corporate governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen sudah selaras dengan kepentingan pemegang saham.

Selain mekanisme *corporate governance*, ada juga beberapa aspek yang dapat mempengaruhi konflik kepentingan yang terjadi salah satunya adalah ukuran perusahaan. Dalam teori agensi dijelaskan bahwa semakin besar suatu perusahaan, maka semakin kompleks dan beragam aktivitas serta strukturnya sehingga dapat mempengaruhi potensi konflik kepentingan dan tingkat pengawasan yang diperlukan. Ukuran yang besar meningkatkan kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat dan penerapan sistem kontrol yang kuat, yang dapat membantu menjaga integritas laporan keuangan. Akan tetapi, pada saat yang sama perusahaan besar juga menghadapi tantangan berupa kompleksitas operasional dan tekanan dari pemangku kepentingan untuk mempertahankan kinerja, yang dapat mendorong praktik manipulasi laporan keuangan.

Tidak hanya itu, *leverage* pun memiliki pengaruh yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dalam perusahaan. *Leverage* adalah penggunaan hutang oleh perusahaan untuk mendanai operasional atau investasi, yang meningkatkan risiko keuangan perusahaan. *Leverage* yang tinggi dapat menciptakan tekanan bagi manajemen untuk mencapai target

keuangan tertentu agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang, sehingga mempengaruhi keputusan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, dalam teori agensi dijelaskan bahwa *leverage* dapat berdampak negatif jika manajemen terpaksa atau tergoda untuk memanipulasi angka-angka demi menjaga hubungan dengan kreditor atau menutupi risiko keuangan yang sebenarnya.

2.1.2 Integritas Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Karakteristik kualitatif fundamental yang harus dimiliki laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut berintegritas telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Verry, dkk. (2017) menyatakan bahwa integritas laporan keuangan merupakan penyajian laporan keuangan secara jujur dengan menggambarkan realitas ekonomi perusahaan sesungguhnya.

Penulis mengadopsi model pengukuran Beaver *and* Ryan (2000) sebagai alat ukur integritas laporan keuangan dengan menggunakan *market to book value* yang diukur dari nilai pasar saham dibagi dengan nilai buku. Alasan peneliti memilih alat ukur di atas karena mudah diimplementasikan, kelengkapan data yang dibutuhkan mudah diakses, dan beberapa peneliti telah menggunakan *market to book value* sebagai alat ukur integritas laporan keuangan di antaranya penelitian yang

dilakukan oleh Istiantoro, dkk. (2017) serta Atiningsih dan Suparwati (2018).

2.1.3 Mekanisme *Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG) dalam Mahiswari dan Nugroho (2014) *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Dalam KNKG terdapat aspek-aspek dalam rangka penyelenggara *corporate governance* yang baik yaitu perusahaan wajib memiliki komisaris independen, komite audit, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Dalam penelitian ini mekanisme *corporate governance* diproses dengan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit.

2.1.4 Komisaris Independen

Menurut Fahmi (2014) komisaris independen adalah komisaris yang tidak memiliki saham namun ditunjuk untuk menjadi komisaris independen karena faktor kapasitas kepemilikan ilmu dan pengalaman dalam bidang tersebut telah diakui dan mampu memberi masukan kepada pihak dewan komisaris dalam setiap pengambilan keputusan, terutama keputusan-keputusan yang diusulkan oleh pihak manajemen perusahaan.

Komisaris independen bertugas sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Keberadaan komisaris independen yang ada di dalam perusahaan memiliki fungsi untuk mengawasi dan melindungi pihak-pihak di luar manajemen perusahaan, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara para manajer internal, dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen sehingga komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar terciptanya perusahaan yang *good corporate governance* dan menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas tinggi (Istiantoro, dkk. 2017). Maka ukuran komisaris independen dalam penelitian ini yaitu persentase jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris.

2.1.5 Kepemilikan Institusional

Menurut Ariantono (2017) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun. Menurut Widiastuti, dkk. (2013) adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung kinerja manajemen.

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki institusi. Semakin meningkat persentase kepemilikan institusional di suatu perusahaan maka akan

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi integritas laporan keuangan.

2.1.6 Komite Audit

Menurut POJK Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Menurut Herawaty (2007) komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern.

Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua *stakeholder*, dan pengungkapan semua informasi yang dilakukan oleh manajemen meski ada konflik kepentingan. Maka dari itu, komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi manipulasi dalam penyajian informasi akuntansi sehingga integritas laporan keuangan dapat meningkat (Dwidinda, dkk. 2017).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga orang) anggota. Maka ukuran komite audit dalam penelitian ini adalah jumlah anggota komite audit yang berada di dalam perusahaan.

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana sebuah perusahaan diklasifikasikan dalam skala besar dan skala kecil. Ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dari laporan keuangannya. Ukuran perusahaan diukur dari total aset yang akan ditransformasi dalam bentuk logaritma dengan tujuan untuk menyamakan dengan variabel lain, karena nilai total aset perusahaan relatif lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel lain pada penelitian. Ukuran perusahaan akan dihitung berdasarkan nilai natural log (ln) dari total aset lebih stabil dan representatif dalam menunjukkan ukuran perusahaan (Ardi dan Lana, 2007 dalam Febriliyantri, 2020).

2.1.8 Leverage

Menurut Verrya, dkk. (2017) *leverage* merupakan proporsi total utang terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu hutang. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi berarti perusahaan memiliki risiko keuangan yang tinggi karena mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan hutang yang tinggi untuk membiayai aktivasnya. Dalam penelitian ini, *leverage* akan diukur dari seberapa besar perbandingan total utang dengan total aset perusahaan yaitu dengan menggunakan *debt asset to ratio*.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian yang dijadikan referensi penelitian yang pertama adalah Gayatri dan Suputra (2013) dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh *corporate governance*, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012. Metode penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan menyisakan 12 perusahaan sehingga data observasi berjumlah 48 sampel. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Selanjutnya penelitian Fatimah, dkk. (2020) dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh *corporate governance*, *audit tenure*, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Metode penentuan sampel dilakukan dengan teknik *judgement sampling* dan menyisakan 19 perusahaan sehingga data observasi berjumlah 95 sampel. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, *audit tenure*, ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan sedangkan kepemilikan institusional, komite audit,

dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian Fajaryani (2015) dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, *leverage*, dan spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2013. Metode penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan menyisakan 9 perusahaan sehingga data observasi berjumlah 54 sampel. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan spesialisasi industri auditor berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, *leverage* berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian Mais dan Nuari (2016) dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen dan kepemilikan institusional, serta pengaruh ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015. Metode penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan menyisakan 11 perusahaan sehingga data observasi berjumlah 44 sampel. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, kepemilikan institusional dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian Indrasti (2020) dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh direksi independen, kepemilikan institusional, kebijakan hutang, dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Metode penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan data observasi berjumlah 102 sampel. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komisaris independen dan kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian Johana dan Djuitaningsih (2020) dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. Metode penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan data observasi berjumlah 128 sampel. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, ukuran

komite audit, dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan institusional dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian Qonitin dan Yudowati (2018) dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit, serta pengaruh kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Metode penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh 45 data observasi yang terdiri dari 9 perusahaan. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, komite audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian Wulandari dan Budiarta (2014) dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen, dan dewan direksi terhadap integritas laporan keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012. Metode penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 15 perusahaan sehingga data

observasi berjumlah 45 sampel. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan dewan direksi berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan manajemen, komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian Verya, dkk. (2017) dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan *good corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Metode penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan menyisakan 83 perusahaan sehingga data observasi berjumlah 249 sampel. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian Wijaya (2022) dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, kualitas audit, dan *financial distress* terhadap integritas laporan keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020. Metode penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan mengambil sampel sebanyak 39

perusahaan dan mendapatkan data observasi berjumlah 96 sampel. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan *financial distress* berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

